

## TAJUK RENCANA

### Tugas Berat Anggota DPR 2024-2029

SEBANYAK 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 telah resmi dilantik di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan Jakarta, Selasa (1/10). Mereka berikrar mengabdikan diri untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya. Kita tentu mengucapkan selamat kepada anggota DPR RI periode 2024-2029, baik wajah baru maupun lama, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Juga kepada 152 anggota DPD RI yang ikut dilantik kemarin. Tugas berat ada di pundak mereka untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Kita berharap pelantikan itu bukan seremonial belaka, melainkan jauh lebih penting meneguhkan komitmen untuk berjuang bersama rakyat membangun peradaban yang lebih baik. Dari aspek legislasi, masih banyak PR yang belum dituntaskan DPR periode sebelumnya, sebagaimana diingatkan Komnas HAM. Antara lain, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) hingga revisi UU Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO (KR 2/10). Di samping juga perlunya prioritas legislasi terkait pembangunan dan investasi yang erat terkait atau dapat berdampak terhadap HAM.

Kita perlu mengingatkan kepada seluruh anggota DPR RI periode 2024-2029, untuk benar-benar memosisikan diri sebagai wakil rakyat sesuai nama institusinya, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan perwakilan partai. Meski mereka bisa duduk di dewan karena diusung partai, namun begitu menjabat sebagai anggota DPR, maka harus bertindak atas nama rakyat yang diwakilinya. Namun, antara realitas dan harapan (idealisme), terasa masih timpang. Umumnya, mereka lebih banyak mewakili kepentingan partainya, ketimbang rakyat yang diwakilinya.

Kita masih ingat ketika Mahfud MD yang saat itu menjabat Menkopolkum meminta kepada Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau lebih akrab disapa Bambang Pacul menyelesaikan RUU Perampasan Aset, yang

langsung dijawab hal itu tergan-tung pimpinan parpol. Dari pernyataan itu saja mudah disimpulkan bahwa mereka yang duduk di DPR lebih tunduk pada pimpinan parpol ketimbang rakyat yang diwakilinya.

Secara organisatoris kepartaian mungkin hal itu bisa dipahami bahwa kader bisa duduk di DPR karena éjasaí parpol yang meng-sungungnya. Namun tak boleh lupa, mereka bisa duduk di kursi terhormat itu karena dipilih rakyat. Konkretnya, bila rakyat tidak memilih mereka maka tak mungkin bisa duduk di kursi DPR. Hal itulah yang ingin kita ingatkan kepada anggota DPR periode 2024-2029 agar jangan lalai mengemban amanat dan aspirasi rakyat yang telah memilihnya.

Bahwa secara administratif-organisatoris mereka tunduk pada parpol, tentu dapat dipahami, namun kepentingan rakyat harus diprioritaskan. Kita juga paham bahwa Indonesia menganut demokrasi perwakilan yang tercermin dari lembaga perwakilan rakyat atau DPR. Karenanya, kita mengingatkan DPR tak boleh mengabaikan suara rakyat, melainkan harus mengakomodasi kepentingan dan aspirasi rakyat.

Sejujurnya, kita membutuhkan wakil rakyat yang peka menan-gkap denyut nadi kehidupan masyarakat yang paling bawah. Sebab, selama ini suara mereka tidak didengar karena tak memiliki akses untuk mengartikulasikan aspirasinya. Di sinilah butuh kepekaan atau empati dari wakil rakyat, agar mampu menyelami apa yang dirasakan masyarakat. Itulah wakil rakyat yang sesungguhnya, bukan sekadar étebar pesonaí berkunjung ke daerah-daerah.

Kita berharap anggota DPR periode 2024-2029 bisa menjadi penyeimbang pemerintah sehingga mekanisme check and balances bisa berjalan secara efektif. Kalaupun tidak ada oposisi, kita tetap membutuhkan figur yang vokal memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat melalui DPR. □-d

## Literasi Pilkada, Kampus dan Komunitas

### Syamsudin

dalam memilih pemimpin yang mengerti kebutuhan masyarakat dan berani mengambil keputusan yang memihak rakyat.

### Peran Kampus

Kampus memiliki peran strategis dalam mendorong literasi Pilkada melalui beberapa cara:

Satu: Mobilisasi sumber daya literasi: Kampus dapat menggerakkan sumber daya intelektualnya untuk menyediakan kajian dan informasi kritis mengenai calon pemimpin, kebijakan yang diusulkan, serta isu-isu penting yang di-



KR-JUKO SANTOSO

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu momen penting dalam demokrasi lokal, di mana warga berperan aktif dalam menentukan siapa yang akan memimpin daerah mereka. Namun, seringkali, proses ini tidak berjalan ideal karena keterbatasan informasi, praktik politik uang, dan manipulasi politik yang merendahkan martabat warga.

Karena itu, literasi Pilkada menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran kritis warga agar mereka mampu memilih pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat dan berani membela kepentingan rakyat.

Dalam konteks ini, kampus dan komunitas memainkan peran vital. Kampus sebagai pusat pendidikan dan intelektual memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang memadai, kritis, dan konstiusional tentang Pilkada.

Pada sisi yang lain, komunitas harus menjadi kekuatan utama yang memastikan integritas proses Pilkada, terutama dalam memerangi politik uang dan penyebaran ujaran kebencian. Dengan kolaborasi antara kampus dan komunitas, Pilkada dapat menjadi momen warga untuk bertindak sebagai subjek yang berdaulat dalam menentukan pemimpin mereka.

### Urgensi

Literasi Pilkada adalah bagian dari upaya meningkatkan kemampuan warga untuk memahami secara kritis proses, regulasi, dan dampak dari pemilihan kepala daerah. Hal ini mencakup pemahaman tentang hak-hak konstitusional, peran pemimpin daerah, dan tantangan yang dihadapi dalam demokrasi lokal. Beberapa aspek penting dalam literasi Pilkada meliputi:

Satu: Informasi yang memadai dan akurat: Warga perlu mendapatkan akses terhadap informasi yang benar mengenai calon pemimpin, kebijakan yang diusulkan, serta dampak dari pilihan mereka. Informasi ini harus objektif dan didasarkan pada data, bukan sekadar janji politik atau bahkan sekadar gim-mik.

Dua: Kesadaran kritis dan konstitusional: Literasi Pilkada mendorong warga untuk berpikir kritis dan tidak hanya memilih berdasarkan popularitas atau tekanan sosial, melainkan berdasarkan rekam jejak calon, kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan ketaatan calon terhadap konstitusi.

Tiga: Warga sebagai subyek: Pilkada bukan hanya ajang politik elite, tetapi juga momen di mana warga memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan daerah mereka. Karena itu, warga harus memahami tanggungjawabnya

hadapi oleh masyarakat lokal. Misalnya, melalui seminar, diskusi publik, penerbitan jurnal, atau kampanye pendidikan politik.

Dua: Metodologi pengajaran dan analisis: Sebagai pusat pembelajaran, kampus dapat memberikan metodologi yang tepat untuk membedah dinamika politik lokal secara akademis. Misalnya, dengan mengajarkan teknik analisis kebijakan, kajian politik lokal, dan hukum konstitusional yang dapat membantu warga memahami lebih dalam proses Pilkada.

Tiga: Monitoring proses Pilkada: Kampus juga dapat berperan sebagai pengawas independen dalam proses Pilkada, memastikan semua tahapan Pilkada berjalan sesuai aturan konstitusional dan demokratis. Dalam hal ini, kampus dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas pemilu serta media untuk melakukan pemantauan independen terhadap potensi kecurangan.

### Peran Komunitas

Selain kampus, komunitas juga berperan penting dalam menjaga integritas

proses Pilkada, terutama dalam menghadapi masalah-masalah seperti politik uang, penyebaran kebencian, dan manipulasi politik. Beberapa peran komunitas yang dapat dioptimalkan meliputi:

Satu: Membangun kesadaran warga: Komunitas harus menjadi subjek aktif dalam pembelajaran mengenai dampak negatif dari politik uang dan bagaimana hal itu merugikan mereka dalam jangka panjang. Melalui kegiatan komunitas, seperti diskusi kelompok, kampanye lokal, dan acara sosialisasi, dapat dibangun kesadaran bersama tentang pentingnya memilih berdasarkan kualitas calon, bukan karena iming-iming materi.

Dua: Menolak politik uang dan ujaran kebencian: Komunitas harus menjadi garda terdepan dalam melawan praktik politik uang dan kampanye yang menyebarkan kebencian. Mereka dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pengawas untuk melaporkan dan memerangi segala bentuk manipulasi politik yang merendahkan martabat warga.

Tiga: Membangun solidaritas sosial: Komunitas yang kuat dapat menciptakan solidaritas sosial yang mendorong partisipasi politik warga secara aktif dan cerdas. Komunitas juga dapat berfungsi sebagai ruang bagi warga untuk berdiskusi dan menentukan pilihan politik mereka berdasarkan kepentingan bersama.

Literasi Pilkada adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan kampus, komunitas, dan warga negara secara keseluruhan. Dengan literasi yang memadai, warga dapat menjadi subjek dalam proses Pilkada, bukan sekadar objek manipulasi politik. Kampus sebagai agen literasi dan komunitas sebagai kekuatan sosial harus berkolaborasi untuk menciptakan proses Pilkada yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hanya dengan begitu, Pilkada akan menjadi momen warga untuk memilih pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan mereka dan berani membela kepentingan rakyat. □-d

\*) Syamsudin MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPI45.

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaualatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Kedaualatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)  
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaualatan Rakyat Yogyakarta,  
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Komisarís Utama: Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriana Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE  
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subhan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyanti.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)  
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaualatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Musliikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## Kanker Payudara dan Kesadaran Masyarakat

### IM Sunarsih

SETIAP Oktober, dunia memperingati bulan kesadaran kanker payudara (*Breast Cancer Awareness Month*). Berbagai gerakan telah dimulai sejak tahun 1985 oleh Asosiasi Kanker Amerika (*American Cancer Society*) dan telah menginspirasi banyak orang untuk semakin peduli dan sadar akan isu kanker payudara yang dapat menyerang siapa saja dan kapan saja. Namun, bagaimana tingkat *awareness* masyarakat Indonesia mengenai kanker ini? *Awareness* untuk melakukan deteksi dini dan *awareness* untuk segera melakukan pengobatan medis.

### Tersendatnya Deteksi Dini

Kanker payudara adalah penyakit di mana sel-sel payudara abnormal tumbuh tak terkendali dan membentuk tumor. Jika tidak ditangani, tumor dapat menyebar ke seluruh tubuh dan berakibat fatal. Laporan dari *The Global Cancer Observatory* (GLOBOCAN) 2018, jumlah kasus baru kanker di Indonesia diprediksi meningkat dan kanker payudara menempati urutan teratas, diikuti kanker serviks dan kanker paru-paru. Yang mengkhawatirkan, banyaknya kasus kanker, termasuk kanker payudara, 70 persen ditemukan memasuki stadium lanjut (III dan IV). Banyak perempuan menganggap remeh tanda-tanda awal kanker, seperti adanya benjolan di payudara atau perubahan fisik lainnya.

Ketika sakit semakin parah dan mulai ada gejala-gejala yang mencemaskan, barulah pergi ke dokter. Pada kanker stadium lanjut, pengobatan rumit, berat, membutuhkan biaya lebih besar dan risiko kematian lebih tinggi. Ini mengindikasikan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya deteksi dini kanker payudara masih rendah. Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang dapat dicegah atau diminimalisasi keganasannya jika ditemukan pada stadium awal. Kebanyakan orang tidak akan mengalami gejala apa pun saat kanker masih tahap awal, oleh karena itu deteksi dini sangatlah penting.

Penanggulangan kanker payudara diperlukan penanganan terpadu dan berkesinambungan. Ada tiga pilar perlu mendapat perhatian, ialah promosi kesehatan pada masyarakat, diagnosis tepat waktu dan manajemen kanker payudara yang komprehensif. Pencegahan primer perlu dilakukan dengan menghindari faktor risiko dan menjalankan perilaku hidup CERDIK (Cek Kesehatan Secara Rutin, Enyahkan Asap Rokok, Rajin Aktivitas Fisik, Diet Gizi Seimbang, Istirahat Cukup, Kelola Stres). Pencegahan sekunder dengan melakukan deteksi dini kanker. Pencegahan tertier dengan melakukan pengobatan secepat mungkin. Strategi untuk meningkatkan hasil pengobatan kanker payudara bergantung pada penguatan sistem kesehatan fundamental untuk memberikan perawatan yang sudah diketahui berhasil serta memiliki jalur rujukan yang andal dari fasilitas perawatan primer ke rumah sakit pusat kanker khusus. Kondisi ini dapat mengendalikan risiko kematian bagi pasien kanker. □-d

Deteksi dini kanker payudara dapat dilakukan dengan Periksa Payudara Sendiri (SADARI), Periksa Payudara Klinis (SADANIS), USG Payudara dan Mamografi. SADARI dilakukan sendiri oleh perempuan seminggu setelah menstruasi. Bila menemukan benjolan atau tanda-tanda lain yang tidak biasa, segera diperiksakan ke pelayanan kesehatan. SADANIS adalah pemeriksaan payudara oleh tenaga kesehatan terlatih untuk melihat adanya benjolan. USG dan mamografi, pemeriksaan dilakukan di klinik atau rumah sakit. Beberapa lembaga melakukan pemeriksaan payudara gratis dengan USG, namun belum banyak yang memanfaatkannya. Mengapa perempuan tidak melakukan deteksi dini kanker payudara? Survei menunjukkan, karena takut ketahuan penyakitnya. Padahal, kanker dapat disembuhkan bila ditemukan dalam stadium dini dan diobati secara cepat dan tepat.

### Penundaan Pengobatan Medis

Penundaan pengobatan medis, mengakibatkan penyakit berlanjut. Menurut penelitian, pasien menunda untuk melakukan pengobatan medis disebabkan beberapa hal. Karena rasa takut untuk operasi, takut kehilangan payudara, takut efek samping obat, takut kehilangan suami serta karena kurang pengetahuan tentang gejala kanker. Munculnya benjolan di payudara, dikira *ngrangkaki* seperti ibu menyusui atau *mlanjer* setelah berolahraga. Ditambah lagi, adanya budaya harus menurut suami yang tak mengizinkan istri operasi serta percaya pada pengobatan alternatif dan mitos bahwa operasi akan membuat kanker menyebar, mengakibatkan jumlah pasien stadium lanjut membengkak.

\*) Dr Dra IM Sunarsih SU Apt, Ketua I YKI DIY Penasehat TP. PKK DIY.

## Pojok KR

Komnas HAM minta DPR 2024-2029 prioritaskan RUU PPRT.

-- Rakyat harus dinomorsatukan.

\*\*\*

Puan Maharani pimpin lagi DPR RI.

-- Tak ada saingannya.

\*\*\*

Pertemuan Megawati-Prabowo tinggal menghitung hari.

-- Yang penting isi pertemuannya.

Berabe